

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan *Fiscal Stress* Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Lampung

Risa Novianti ^{1*}, Khairudin ²

^{1*,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh dari dua variabel, yaitu Ukuran Pemerintah Daerah dan Fiscal stress, terhadap Alokasi Belanja Modal di kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir, yaitu 2019-2021. Kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi populasi studi dengan jumlah sebanyak 48 wilayah, dan untuk mendapatkan hasil yang representatif, penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data dan pembahasan adalah metode kuantitatif, dengan mengaplikasikan analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis. Metode-metode tersebut memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Fiscal stress terhadap Alokasi Belanja Modal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal di kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menemukan adanya dampak yang signifikan dari Fiscal stress (FIST) terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi kebijakan yang berharga bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal dengan lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: Ukuran Pemerintah Daerah (UPD); Fiscal Stress (FIST).

Abstract. This study aims to examine the effects of two variables, namely regional government size and financial pressures, on the distribution of investment spending in the districts/cities of Lampung province over the three last year, specifically 2019-2021. The districts/cities of Lampung province became the study population with a total of 48 regions and to obtain representative results this study used saturation sampling method. The methods used in data analysis and discussion are quantitative methods, applying descriptive statistical analysis, panel data regression analysis and hypothesis testing. These methods provide a more detailed picture of the impact of local government size and budgetary constraints on the allocation of investment spending. The results of this study indicate that partly or simultaneously, the size of the regional government (UPD) has a significant positive effect on the allocation of investment spending in the districts/cities of Lampung province. However, this study did not find any significant effect of budgetary stress (FIST) on investment expenditure allocation. These results can provide valuable information and policy recommendations for decision-making at the local government level to promote more efficient allocation of investment spending.

Keywords: Regional Government Size (UPD); Fiscal Stress (FIST).

* Author. Email: risanovianti26@gmail.com ^{1*}, khairudin@ubl.ac.id ².

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, semua tingkat provinsi dan kabupaten/kota diizinkan untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah semacam penyerahan kekuasaan dan kewajibam dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas pengelolaan dan pengaturan keuangan dan non keuangan daerahnya masing-masing. Otonomi daerah ini memiliki tujuan demi mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk daerah otonom dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik serta menumbuhkembangkan daya saing daerah.

Belanja Modal ialah kesatuan dari anggaran belanja langsung pemerintah yang menghasilkan produksi aset tetap. Penambahan aset tetap/persediaan yang menghasilkan keuntungan lebih dari satu periode akuntansi, serta biaya perawatan untuk mempertahankan atau memperlama masa keuntungan, mengoptimalkan kemampuan dan kualitas aset (Indarti & Sugiarto, 2012). Umumnya, belanja modal digunakan untuk membangun dan meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat (Simanjuntak & Ginting, 2019). Oleh karena itu, Anggaran Belanja Modal harus benar-benar disalurkan oleh pemerintah daerah, sebab Belanja Modal ialah satu dari berbagai kegiatan pemerintah daerah demi memfasilitasi pelayanan public (Hamid & Yusuf, 2023; Putri, 2023; Sufriadi, 2023).

Tabel 1. Realisasi Belanja Modal Provinsi Lampung Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
2019	Rp 4.528,49 M	-Rp 1.638,77 M	-0,26%
2020	Rp 3.513,00 M	-Rp 1.015,49 M	-0,22%
2021	Rp 3.812,11 M	Rp 299,11 M	0,08%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id.

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 1, terlihat bahwa realisasi Belanja Modal di

Provinsi Lampung mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019, realisasi Belanja Modal mencapai Rp 4.528,49 M, sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu 2018, mencapai Rp 6.167,26 M, menunjukkan penurunan sebesar -0,26%. Selanjutnya, pada tahun 2020, terjadi penurunan lebih lanjut dalam realisasi Belanja Modal menjadi Rp 3.513,00 M, yang berarti mengalami penurunan sebesar -0,22%. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2021, dengan realisasi Belanja Modal mencapai Rp 3.812,11 M, namun tetap terjadi penurunan sebesar 0,08% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data ini mengindikasikan bahwa penyerapan Belanja Modal di Provinsi Lampung cenderung rendah selama tiga tahun terakhir. Tingkat penyerapan belanja modal merupakan indikator penting yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, Belanja Modal memiliki peran krusial sebagai sumber investasi untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam aset tetap seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi telah terbukti berkontribusi secara positif pada peningkatan kualitas hidup penduduk. Oleh karena itu, peningkatan alokasi Belanja Modal menjadi prioritas penting dalam anggaran pemerintah daerah. Namun, realitas di Provinsi Lampung menunjukkan penurunan yang konsisten dalam penyerapan Belanja Modal selama tiga tahun terakhir. Situasi ini menjadi perhatian serius karena tingkat penyerapan yang rendah dapat berdampak negatif pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini akan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi Belanja Modal di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, termasuk kabupaten/kota. Dengan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi kendala-kendala yang menghambat penyerapan Belanja Modal dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang akurat dan tepat sasaran untuk mengoptimalkan alokasi Belanja Modal sehingga dapat secara efektif mendorong

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di Provinsi Lampung. Dengan adanya rekomendasi yang didukung oleh data dan analisis yang kuat, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Tinjauan Literatur

Agency Theory

Jensen & Meckling (2019) mengTabelkan relasi keagenan sebagai pengaturan kontraktual di mana satu atau lebih pihak (*principal*) menyertakan pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan layanan tertentu demi keuntungannya sambil mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan tertentu kepada agen tersebut (Alchian, 1965; Vafeas, 1999). Akan ada konflik kepentingan dan pendelegasian tanggung jawab kepada agen yang kepentingannya tidak selaras dengan kepentingan prinsipal, melainkan kepentingan mereka sendiri, dengan mengorbankan barang publik. Kontrak pemerintah daerah yang sebenarnya antara agen dan prinsipal ialah APBD (Fattimah, Hanifah, & Kurniawati, 2023). Eksekutif (agen) membuat APBD sejalan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran, yang ditinjau dan dibahas oleh legislatif (kepala sekolah) sebelum menjadi peraturan daerah (Perda). APBD dapat memantau anggaran eksekutif (agen) untuk anggaran primer (legislatif). Sebagai perwakilan publik, legislatif dapat memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam situasi ini.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari pengeluaran anggaran yang difokuskan pada perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Fitri & Putri, 2019; Hamid & Yusuf, 2023). Aset-aset ini memiliki sifat berwujud dan bertujuan untuk meningkatkan portofolio aset pemerintahan (Dahlia, 2018). Dalam pemerintahan, Belanja Modal berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang memiliki dampak jangka panjang.

Aset-aset tetap seperti gedung, jalan, jembatan, dan peralatan penting lainnya memiliki manfaat yang berkelanjutan selama masa penggunaannya. Selain itu, pengeluaran Belanja Modal juga mencakup investasi pada aset-aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan strategis bagi pemerintahan, seperti investasi pada teknologi informasi dan sumber daya manusia. Dalam merencanakan dan mengalokasikan Belanja Modal, pemerintah perlu mempertimbangkan tujuan jangka panjang pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Pengeluaran yang tepat dalam Belanja Modal dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola Belanja Modal secara efisien dan transparan, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran ini mendukung prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh warga negara.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan entitas kepala daerah yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan hak dari daerah otonom (Rahayu, 2022; Abdullah, 2016). Sebagai pemimpin di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan pelayanan publik, mengimplementasikan program-program pembangunan, serta mengawasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah otonom tersebut. Tugas-tugas pemerintah daerah mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya. Mereka juga bertugas untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta dan organisasi masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Sebagai wakil dari pemerintah pusat di tingkat lokal, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional dan mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencapai tujuan pembangunan

nasional. Namun, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah juga harus memperhatikan dan memahami kondisi serta kebutuhan unik dari daerah otonom yang mereka pimpin. Dengan demikian, kepala daerah dan pemerintah daerah secara keseluruhan memainkan peran sentral dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk bekerja dengan penuh integritas, berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, serta senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di daerah yang mereka layani.

Fiscal stress

Fiscal stress atau tekanan keuangan terjadi ketika pendapatan pemerintah daerah menurun tanpa disertai penurunan permintaan layanan pemerintah daerah (Lhutfi, Ritchi dan Yudianto, 2019; Rossy, 2013). Hal ini dapat terjadi ketika berbagai faktor ekonomi atau keuangan mempengaruhi pendapatan anggaran pemerintah daerah, seperti perubahan ekonomi nasional atau lokal, fluktuasi harga barang, dll atau perubahan kebijakan pajak. Selain itu, tekanan fiskal juga terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap layanan publik meningkat tetapi pendapatan daerah tidak dapat meningkat seiring dengan peningkatan permintaan (Syaliha, 2021; Armini, 2019). Pertambahan penduduk, perubahan demografi, dan kebutuhan sosial yang semakin kompleks dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya permintaan akan layanan pemerintah.

Ketegangan keuangan ini dapat menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan layanan publik yang efektif. Dalam situasi ini, pemerintah daerah dihadapkan pada dilema pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien untuk menghadapi tekanan fiskal, dengan tetap mengutamakan pelayanan publik yang berkualitas. Upaya mengatasi tekanan anggaran dilakukan dengan berbagai strategi, seperti meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, mencari alternatif sumber pendapatan lain, dan upaya

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah pusat juga dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi tekanan fiskal dan mencapai keseimbangan fiskal yang berkelanjutan.

Hipotesis

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal

Agency Theory yang diperkenalkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan jika masalah keagenan yang terjadi pada organisasi dapat meminimalisir oleh Tindakan pengawasan oleh principal kepada agent. Tindakan pengawasan oleh principal kepada agen sangat diperlukan sebagai upaya agar perilaku agen sesuai kepentingan principal dan tidak menyimpang. Tindakan pengawasan oleh principal kepada agen dapat dilakukan dengan pengawasan Legislatif atas Pertanggungjawaban Anggaran. Pemerintah Daerah memiliki ukuran untuk memfasilitasi masyarakat dengan servis yang sebesar-besarnya. Wilayah yang lebih besar akan memerlukan lebih banyak fasilitas dan infrastruktur. Jika suatu wilayah memiliki wilayah yang lebih lebar dan banyaknya penduduk yang lebih besar, dan pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga harus tersedia fasilitas yang cukup.

Studi sebelumnya tentang Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal belum ditemukan. Hipotesis yang diajukan pada bagian ini didasarkan pada *Agency Theory* dan penjelasan logis keterkaitan antara variabel Ukuran Pemerintah Daerah dan Variabel Alokasi Belanja Modal. Rumusan hipotesis yang dibangun berdasarkan penjelasan teori dan penjelasan logis diatas adalah:

H1 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh *Fiscal stress* terhadap Alokasi Belanja Modal

Fiscal stress ialah tekanan anggaran (keuangan) yang disebabkan oleh pendapatan daerah yang tidak memadai, yang mungkin berdampak signifikan pada penyediaan layanan publik (Arnet, 2012). Dimana tekanan keuangan

berkembang sebagai akibat dari permintaan untuk lebih mandiri dengan maksud memperluas pendapatan sendiri untuk membayar berbagai biaya saat ini. Menurut studi Kusumaningrum (2021) dan Bungin (2022), tekanan fiskal tidak berdampak menguntungkan pada belanja modal.
H2 : *Fiscal stress* berpengaruh Positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Metodologi Penelitian

Studi ini merupakan penelitian kuantitatif, yang merupakan suatu teknik penelitian yang berbasis pada fakta-fakta nyata (konkret). Data dalam penelitian ini berupa angka-angka yang akan dievaluasi menggunakan statistika sebagai alat uji aritmatika, dengan tujuan untuk menyusun suatu deduksi (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dari tahun 2019 hingga 2020. Untuk pengambilan sampel, digunakan teknik sampel jenuh, di mana jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi. Sampel penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara menyeluruh, jelas, dan komprehensif, serta telah dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam periode tiga tahun, yaitu 2019-2021.

Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah sumber data sekunder. Menurut pendapat Umar (2013), data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber lain, seperti buku, laporan perusahaan, jurnal, internet, dan sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari laporan anggaran dan pelaksanaan APBD yang dikumpulkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam pengumpulan data, digunakan pendekatan dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder dari BPKAD. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel, dan pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel 2021 sebagai alat pengolahan data serta perangkat lunak komputer EvIEWS9.

Pendekatan dan metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk menguji dampak variabel Ukuran Pemerintah Daerah dan *Fiscal stress* terhadap Alokasi Belanja Modal di kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2019-2021.

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	BM	UPD	FIST
Mean	244227.8	2569866.	3640108.
Median	207640.0	2427339.	-1905950.
Maximum	868900.0	5097744.	-1060750.
Minimum	101404.0	593994.0	-9538200.
Std. Dev.	168352.1	1068115.	3090823.
Skewness	2.610598	0.771514	-0.855185
Kurtosis	9.676141	3.456573	1.962068
Jarque-Bera	143.6635	5.178785	8.005332
Probability	0.000000	0.075066	0.018267
Sum	11722934	1.23E+08	-1.75E+08
Sum Sq. Dev.	1.33E+12	5.36E+13	4.49E+14
Observations	48	48	48

Nilai *mean* BM pada 16 kabupaten/kota selama 3 tahun adalah 244.227,8 dimana lebih tinggi dari angka standar deviasi sebesar 168.352,1 hal ini memperlihatkan bahwa data bersifat homogen Sedangkan nilai maximum dari BM adalah Rp 868.900 terdapat pada Provinsi Lampung pada tahun 2021. hal ini menunjukan banyaknya fasilitas yang dibangun oleh pemerintah daerah tersebut. Sedangkan nilai terendah sebesar Rp 101.404 terdapat pada Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 hal ini menunjukan pemerintah di daerah tersebut lebih mengalokasikan dana nya untuk belanja daerah nya. Nilai *mean* BM pada penelitian ini Rp 224.227,8. Hal ini menandakan bahwa Belanja Modal kabupaten di provinsi Lampung masih tergolong rendah, dikarenakan Pendapatan Daerah dari kabupaten tersebut juga rendah.

Nilai *mean* UPD pada 16 kabupaten/kota selama 3 tahun adalah 2.569.866. dimana lebih tinggi dari angka standar deviasi sebesar 1.068.115. Sedangkan nilai maximum dari UPD adalah Rp 5.097.744 terdapat pada Kota Metro

pada tahun 2021 hal ini menunjukkan pemerintah bekerja secara maksimal karena semakin tinggi ukuran pemerintah daerahnya secara tidak langsung pendapatan asli daerah nya pun ikut meningkat. Sedangkan nilai minimum sebesar Rp 593.994 terdapat pada Provinsi Lampung pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak bekerja secara maksimal dan pendapatan dari daerah tersebut kurang mencukupi. Nilai *mean* UPD pada penelitian ini Rp 2.569.866. Hal ini menandakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah kabupaten di provinsi Lampung tergolong cukup baik, artinya penghasilan per penduduk di daerah tersebut cukup tinggi, dilihat dari pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk totalnya.

Nilai *mean* FIST pada 16 kabupaten/kota selama 3 tahun adalah 3.640.108 dimana lebih tinggi dari angka standar deviasi sebesar 3.090.823. hal ini memperlihatkan jika data bersifat homogen. Sedangkan nilai maximum dari FIST adalah -Rp 1.060.750 terdapat pada Kota Metro pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan daerah ini tidak mengalami *fiscal stress* karena pemerintah daerah tersebut bisa menggali potensi-potensi sumberdaya yang dimiliki dapat dilihat pada pendapatan daerahnya yang meningkat. Sedangkan nilai minimum sebesar -Rp 9.538.200 terdapat pada Provinsi Lampung pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah tidak mampu untuk mengelola sumberdaya yang ada pada daerah tersebut. Nilai *mean* FIST pada penelitian ini Rp 3.640.108. Hal ini menandakan bahwa *Fiscal stress* kabupaten di provinsi Lampung tergolong cukup baik, dikarenakan pendapatan total daerah tersebut lebih besar dibanding belanja daerahnya.

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.872818	(15,30)	0.5980
Cross-section Chi-square	17.383012	15	0.2965

Berdasarkan pada tabel sebelumnya, nilai probabilitas *cross section* F adalah 0,5980, dan

peneliti menggunakan tingkat signifikansi yaitu 5% (0,05). Maka bisa diambil kesimpulan bahwa hasil dari pengujian chow pada penelitian ini menetapkan *Common Effect Model*, dikarenakan probability dari cross-section $F > 0,05$.

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.556673	2	0.2785

Berdasarkan tabel sebelumnya, nilai probabilitas *random cross section* adalah 0,2785, dan peneliti menggunakan ambang signifikansi 5% (0,05). Maka bisa diambil kesimpulan bahwa hasil dari pengujian Hausman pada penelitian ini menetapkan *Random Effect Model*, dikarenakan probability dari cross-section $F > 0,05$.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.705475 (0.4009)	1.382267 (0.2397)	2.087742 (0.1485)
Honda	-0.839926 --	-1.175699 --	-1.425262 --
King-Wu	-0.839926 --	-1.175699 --	-1.392469 --
Standardized Honda	-0.439469 --	-0.939839 --	-4.969830 --
Standardized King-Wu	-0.439469 --	-0.939839 --	-3.990334 --
Gourierious, et al.*	--	--	0.000000 (>= 0.10)

Nilai probabilitas multiplier lagrange *cross section* adalah 0,4009, dan peneliti menggunakan ambang batas signifikansi 5%, seperti yang ditampilkan pada Tabel di atas (0,05). Karena nilai probabilitas *cross section* LM lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05, dapat dikatakan bahwa uji Hausman lebih condong pada model efek Cammon daripada model efek acak.

Karena uji Chow dan uji pengali Lagrange memberikan temuan yang identik, yang memperlihatkan jika model yang paling cocok adalah CEM, maka studi ini memakai model *common effect*.

Model Regresi Common Effect Model

Tabel 6. *Common Effect* Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	406915.3	59506.76	6.838136	0.0000
UPD	0.077387	0.025747	-3.005683	0.0043
FIST	-0.009941	0.008898	-1.117308	0.2698
R-squared	0.174221	Mean dependent var	244227.8	
Adjusted R-squared	0.137520	S.D. dependent var	168352.1	
S.E. of regression	156348.2	Akaike info criterion	26.81802	
Sum squared resid	1.10E+12	Schwarz criterion	26.93497	
Log likelihood	-640.6325	Hannan-Quinn criter.	26.86222	
F-statistic	4.747015	Durbin-Watson stat	2.308127	
Prob(F-statistic)	0.013472			

Persamaan regresi data panel untuk dampak Ukuran Pemerintahan Daerah (UPD) dan Stress Fiskal (FIST) terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2019-2021 dapat diturunkan dengan menggunakan Tabel *model common effect* sebelumnya.

Alokasi Belanja Modal = 406915.3 - 0.077387 - 0.009941 + e

Koefisien regresi yang positif memperlihatkan adanya transformasi yang searah antara variabel bebas dan variabel terikat, lain halnya dengan koefisien regresi negatif memperlihatkan adanya transformasi yang berlawanan arah. Koefisien UPD bernilai positif sebesar 0,077387 yang memperlihatkan jika setiap kenaikan UPD akan mengakibatkan kenaikan nilai alokasi belanja modal sebesar 0,077387. Koefisien FIST bernilai negatif -0,009941, yang berarti bahwa kenaikan FIST akan menurunkan nilai alokasi belanja modal sebesar 0,009941 untuk setiap satuan kenaikan FIST.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Nilai F-statistic adalah 4.740715 dan Prob(F-statistic) adalah 0.013472, memperlihatkan jika uji signifikansi $F < 0.05$. Dapat dinyatakan jika model estimasi yang dipakai cukup menjelaskan dampak faktor-faktor independen pada variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis X1, X2 terhadap Y dengan $\alpha=5\%$ (0.05)

	Hipotesis	Coefficient	$\alpha=5\%$	P_value	Kesimpulan
H1	Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal	0.077387	0,05	0.0043	Hipotesis Terbukti/Diterima
H2	Fiscal Stress berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal	-0.009941	0,05	0.2698	Hipotesis Tidak Terbukti/Ditolak

Dari tabel 7 terlihat jika hipotesis penelitian (H1) dapat didukung dan diterima. Karena nilai UPD sebesar $0,0043 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,077387, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen UPD memberikan dampak positif pada variabel dependen Alokasi Belanja Modal. Hipotesis penelitian (H2) tidak dapat dibuktikan dan dengan demikian ditolak. Dikarenakan nilai FIST sebesar $0,2698 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -0,009941 maka hipotesis nol ditolak yang memperlihatkan jika variabel independen FIST tidak memberikan dampak pada variabel dependen Capital Expenditure Allocation.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan Tabel Common Effect Model, nilai R Square adalah 0,174 atau 17,4%. Hal tersebut memperlihatkan jika variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat sebesar 17,4%, sedangkan sisanya sebesar 82,6% didapatkan dari variabel lain diluar variabel bebas.

Pembahasan

Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh Positif terhadap Alokasi Belanja Modal

Tabel 7 menunjukkan, berdasarkan temuan studi, bahwa ukuran pemerintah daerah mempunyai dampak yang menguntungkan terhadap distribusi belanja modal. Hal ini ditampilkan dengan uji t, Koefisien yang bertanda positif memperlihatkan jika pendapatan daerah bertambah sehingga alokasi belanja modal bertambah, kebalikannya jika pemasukan daerah menurun maka alokasi belanja modal menurun.

Sebab, semakin besar UPD, semakin besar pula pengeluaran yang harus dibayarkan untuk daerah dan pendapatan per warga negara. Oleh

karena itu, pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur penduduk setempat.

Fiscal stress tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

Tabel 7 memperlihatkan, berdasarkan temuan studi, bahwa *fiscal stress* tidak memberikan dampak pada alokasi Belanja Modal. Hal ini diperlihatkan melalui uji t, Koefisien bertanda negatif berarti alokasi belanja modal menurun seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, demikian sebaliknya jika alokasi belanja modal meningkat maka pendapatan daerah menurun. Hal ini karena tekanan anggaran yang dialami pemerintah daerah akibat memburuknya keadaan ekonomi dan biaya operasional yang tinggi tidak terkait dengan belanja modal yang merupakan pelayanan publik. Artinya, setiap daerah berhak memperoleh fasilitas umum berupa prasarana dan sarana. Menurut kajian Bungin tahun 2022, budgetary stress berdampak buruk terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan studi dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) memiliki dampak yang positif terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, sementara *Fiscal stress* (FIST) tidak berpengaruh. Dalam upaya untuk mengoptimalkan pemasukan asli daerah dan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal, Pemerintah Daerah (PEMDA) dapat melakukan evaluasi terhadap komposisi belanja. Fokus utama dari evaluasi ini adalah meningkatkan investasi dalam infrastruktur, sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui peningkatan kualitas infrastruktur dalam jangka panjang, wilayah tersebut akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, kesimpulan dari studi ini memberikan arahan kepada PEMDA untuk mengarahkan alokasi belanja pada bidang infrastruktur yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan kemajuan daerah. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan wilayah

tersebut dapat mengoptimalkan potensinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-103.
- Alchian, A. A. (1965). The basis of some recent advances in the theory of management of the firm. *The Journal of Industrial Economics*, 30-41.
- Armainsi, Y. D. N. R. (2019). Determinan Fiscal Stress Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(1), 68-78.
- Bungin, V. S. (2022). Pengaruh Silpa dan Fiscal Stress Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *JLAR: Journal Of International Accounting Research*, 1(01 Mei), 48-57.
- Dahlia, D. (2018). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 2(2), 82-88.
- Fattimah, F. A., Hanifah, W., & Kurniawati, R. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Keuangan dalam Pengeluaran Anggaran di Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat. *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 7(1), 140-148.
- Fitri, N., & Putri, S. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kawasan Barat Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Vol*, 3(1).
- Hamid, A., & Yusuf, Z. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 7(3), 676-683.

- Indarti, I. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 7(2).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower. DOI: [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Kusumaningrum, E. B., & Sugiyanto, H. (2021). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, FISCAL STRESS, DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL. *EKONOMI BISNIS*, 27(2), 630-643.
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2019). Bagaimana Pemerintah daerah merespon Fiscal Stress?. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 76-81.
- Putri, O. H. (2023). Peta Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 191-197.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Rossy, A. E. (2013). *PENGARUH FISCAL STRESS TERHADAP PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se Jawa Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal manajemen*, 5(2), 183-194.
- Sufriadi, D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan ke Kota Sabang. *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 557-562.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syaliha, R. (2021). *Pengaruh Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA) dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Umar, H. (2013). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis. *Jakarta: Rajawali*, 42.
- Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm performance. *Journal of financial economics*, 53(1), 113-142.